

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BUHO- BOHO KECAMATAN MOROTAI TIMUR KABUPATEN PULAU MOROTAI

TRIO YATNO LABAKA
JOYCE JACINTA RARES
BURHANNUDIN KIYAI

Abstrack

Infrastructure development is one of the key and vital aspects to accelerate the national development process, infrastructure also plays an important role as one of the driving wheels of economic growth. In the implementation of village infrastructure, adequate human resources are needed so that the development process can run effectively and efficiently. In this study the author uses the theory of Charles O Jones which suggests about policy implementation, namely implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect. Which consists of three main activities that are very important, namely Organization, Implementation, and application this research user descriptive qualitative research method. The results generally explain that the implementation of infrastructure, development policies in Buho-Buho village, east Morotai District, Morotai Island Regency has not run optimally because the Buho-Buho village government does not yet have adequate human resources

Keywords: Policy implementation, Development, Infrastructure.

PENDAHULUAN

Terbelakangnya daerah pedesaan di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi, daerah pedesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dalam pembangunan, pembangunan merupakan suatu proses perubahan daerah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi kelembagaan dan budaya

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional, infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satau roda penggerak pertumbuhan ekonomi, ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telkomunikasi dan lain oleh karena itu pembangunan sektor ini menjadi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Dalam pelaksanaan infrastruktur desa sendiri membutuhkan sumberdaya manusia yang memadai, bukan jaminan sebuah desa yang

memiliki populasi masyarakat yang besar memiliki sumber daya manusia yang bisa diberdayakan sebagai tenaga kerja ahli dalam proses pengembangan infrastruktur. Karna dengan tenaga ahli sebuah proses pembangunan akan berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Tetapi dalam Implementasi kebijakan Pembangunan di Desa Buho-Buho Kecamatan Morotai Timur Kabupaen Pulau Morotai masih mengalami berbagai kendala kurangnya implementasi kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah sehingga proses pembangunan tidak optimal dan bersifat tidak transparan terhadap masyarakat yang ada. bahkan papan Informasi APB-Des yang ada ditahun 2020 yang sudah di rubah tidak diperbaharui.

Dan juga masyarakat yang benar-benar mengetahui akan titik letak atau kepentingan desa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan dan lebih memilih orang-orang yang berasal dari luar desa sehingga proses pelaksanaan pembangunan Infrastruktur yang ada di desa masih belumlah optimal atau bersifat asal jadi. Perangkat desa juga lalai dalam melaksanakan tugas, karna dalam

seminggu hanya 1 atau 2 hari saja datang ke kantor desa.

Berangkat pernyataan di atas maka di sini penulis ingin meneliti lebih jauh; tentang implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di desa buho-buho kecamatan morotai timur kabupaten pulau morotai; adanya keterkaitan penulis mengangkat judul ini dengan melihat fenomena yang terjadi di desa buho-buho kecamatan morotai timur kabupaten pulau morotai penulis melihat adanya implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak terealisasi dengan baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu

Eli Kristia Saragih, Joyce Jacinta Rares, Joorie M. Ruru (2016) melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara” . Berikut uraian kesimpulan Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Di Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara:

a). Komunikasi, yang terjalin antara pembuat kebijakan (policy maker) yaitu pihak BKPM kepada pelaksana kebijakan (policy implementor) yaitu pihak PTSP sudah bagus, sudah jelas dan dapat di pahami dengan baik begitu juga dari pihak pemberi layanan kepada kelompok sasaran, mereka telah menyampaikan setiap informasi yang terkait dengan kebijakan SPIPISE ini secara sederhana sehingga para investor/calon investor dapat dengan mudah memahami secara jelas mengenai kebijakan ini. b). Sumber Daya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek sumberdayanya masih kurang optimal. Dari sumber daya manusia (staff) masih banyak staf yang belum faham akan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan sub bidang yang mereka tekuni, kemudian masih ada kekosongan jabatan di BKPM, Untuk petugas pelayanan

SPIPISE yang ada di kantor PTSP, dari segi kualitas mereka sudah cukup terampil, profesional dan kompeten dalam bidang pelayanan SPIPISE ini, tapi dari segi kuantitas atau jumlah pegawai yang ada masih perlu adanya penambahan. Dari aspek Anggaran (budgetary) sudah baik, untuk aspek Fasilitas (facility) masih belum sepenuhnya baik karena, terkait dari keadaan gedung Kantor pelayanan masih belum baik begitu juga dengan keadaan jaringan yang sering mengalami gangguan membuat pelayanan perizinan menjadi lambat. Dari unsur Informasi dan kewenangan (Information And Authority) sudah cukup relevan, terkait dengan bagaimana mengimplementasikan kebijakan SPIPISE ini, namun dari segi kewenangan, sistem dari kebijakan ini masih terlalu terpusat. c.) Disposisi, bahwa sikap pegawai sudah baik. dari pihak pimpinan, maupun pegawai yang ada di BKPM serta pegawai pelaksana kebijakan SPIPISE, telah memiliki sifat kejujuran, komitmen yang tinggi, dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan SPIPISE, dan memiliki sifat yang ramah dalam memberikan pelayanan. d.) Struktur Birokrasi, bahwa dari Aspek struktur organisasi yang melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri masih belum optimal, hal ini terlihat dari alur pelayanan Sementara atau SOP yang ada masih bersifat peralihan kemudian mekanisme pelayanan bersifat validasi/verifikasi ganda antara kantor BKPM dan PTSP dan hal ini cukup dirasa terlalu berbelit-belit.

Ayu Ningsi Slamet, Martha Ogotan Very. Y. Londa melakukan penelitian dengan judul ” Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa) berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : Bahwa ADD memang benar ± benar untuk masyarakat, walaupun masih banyak

masyarakat yang mempunyai perbedaan persepsi dengan perangkat desa karena kurangnya sosialisasi dari perangkat desa soal ADD di Desa Kalasey Dua, manfaatnya langsung dirasakan juga oleh masyarakat Desa Kalasey Dua, dan kemudian pelaksana kebijakan ADD ini berjalan cukup maksimal dari Kepala Desa sampai pada perangkat desa yang berhubungan langsung dengan penerapan alokasi dana desa tersebut. Sedangkan, pada Konteks Kebijakan ADD di Desa Kalasey Dua, para aparat desa sudah menjalankan atau menerapkan ADD sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Kalasey Dua, selain itu tugas pokok dan fungsi masing-masing dari aparat desa walaupun terlihat belum terlalu baik secara koordinasi tapi sampai saat ini sudah cukup baik secara komunikasi, baik dari Kepala desa, Sekertaris desa, Bendahara Desa, BPD, dan LPM.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti “negara-kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara. (Dunn, 2007: 51).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan

dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurung waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diciptakan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Actor-aktor implementasi kebijakan

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan diidentifikasi dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi komunitas (Anderson, 1979; Lester dan Stewart, 2000 dalam Solahuddin K, 2009:100).

Konsep pembangunan

Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan

pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan. Pembangunan memiliki makna yang ganda. Yang pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Kedua adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan pendistribusian barang – barang dan peningkatan hubungan sosial. Makna yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial yang terfokus pada pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi serta meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada keseluruhan komponen masyarakat (Sudharto P. Hadi, 2000).

Pembangunan infrastruktur desa

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental ditujukan kepada masyarakat/khalak ramai melayani untuk melayani dan memudahkan masyarakat.

Menurut (Sondang P. 2005) Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu merupakan penunjang utama terselenggarakan suatu proses pembangunan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di desa Buho-Buho kabupaten pulau morotai kecamatan morotai timur

Penekanan focus penelitian bertumpu pada petunjuk yang dikemukakan oleh Moleong (2017: 79). Dimana masalah adalah merupakan focus didalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi objek penelitian atau situasi social yang dapat diamati secara mendalam aktivitas orang yang

ada pada tempat tertentu (Sugiono: 2014: 25). Mengatakan bahwa membatasi penelitian merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkupnya dan batasan yang akan diteliti dalam hal ini mengatakan penyempitan dan penyederdehaan terhadap sarana riset yang luas dan rumit.

Guna menfokus arah dalam penelitian ini peneliti menggunakan pada apa yang dikemukakan Charles O. Jones tersebut, maka masalah implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari:

1. Organisasi
2. Intreperstasi
3. Aplikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Buho-buho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai merupakan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, implementasi kebijakan ini merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan infrastruktur disuatu desa.

Dalam penelitian hasil implementasi dilihat dari 4 aspek yaitu : Organisasi,Intreperstasi, Aplikasi. 3 aspek tersebut akan menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Buho-Boho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai

a. Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan. Jones (1994:166), mengatakan organisasi adalah “kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan”. Bagi Jones (1994:296) organisasi

birokrasi berkaitan dengan (a) pembentukan atau penataan kembali sumber daya, (b) unit-unit, serta (c) metode untuk menjadikan program berjalan. Dengan demikian ketiga aspek ini akan dibahas sebagai berikut:

1. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kritis dari implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf dengan ukuran cukup, dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka, otoritas, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi fungsi pemerintahan. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya Sumber Daya Manusia, terbatasnya dana atau fasilitas dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Sesuai dengan pernyataan dari informan bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan pembangunan infrastruktur dibidang pendidikan memang rendah, sehingga mempengaruhi mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, disamping itu kurang memadainya aparat pelaksana dalam mengoperasikan komputer mempengaruhi pelaksanaan program tersebut, namun demikian mereka mempunyai kemampuan untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan sesuai dengan kemampuan mereka, disamping itu mereka juga mampu mendorong masyarakat

2. Unit unit atau struktur organisasi

Organisasi birokrasi adalah unit-unit organisasi dimana unit-unit organisasi merupakan bagian dari model besar yakni struktur. Struktur adalah mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola, Handoko (1998:169) mengatakan bahwa: “dalam struktur menunjukkan

kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi”.

3. Metode

Metode merupakan rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah, metode tidak kalah penting perannya didalam pencapaian tujuan. Dengan adanya metode dalam sebuah organisasi, maka organisasi tersebut akan lebih mudah dan teratur dalam mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

b. Interpentensi

Keberhasilan Pelaksanaan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dalam hal ini Fasilitator, Tim Teknis, dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara pandangan yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi para pelaksana berbeda pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan. Karena itu, menurut Jones (1994:320) dengan mengutip pernyataan George C. Edwards, mengatakan: ”mereka yang menerapkan keputusan/kebijakan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas, para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai

kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut.

Menyangkut hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa informan yaitu Kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman aparat pelaksana dalam pelaksanaan tugas sangat minim disebabkan keterbatasan dana. Permasalahan yang sama juga didapati dalam pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat

c. Aplikasi

Aplikasi atau Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas belaka.

Menyangkut hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang mengatakan bahwa Pelaksana implementasi kebijakan merupakan tanggungjawab pemerintah desa dan seluruh masyarakat di desa Buho-Buho, jadi dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan kami melibatkan seluruh masyarakat Buho-Buho untuk menuangkan pendapatnya di musrembangdes dengan tujuan dapat membangun desa dengan kebutuhan desa kita sendiri dan masyarakat terlibat langsung pada prosesnya

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang diajukan sebagai berikut :

1. Organisasi pemerintah desa Buho-Buho tingkat pendidikan anggota rata-rata SLTA dan kurang memahami teknologi informasi, selain itu walaupun para pelaksana mempunyai tugas dan fungsi masing-masing ternyata dalam proses pelaksanaan tugasnya masih tumpang-tindih. Dan bilah di lihat dari perekrutan anggota tidak melalui mekanisme

yang mempertimbangkan kapasitas serta jenjang pendidikan melainkan hanya kesediaan masyarakat dalam memberi diri, dari kondisi diatas menyebabkan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di desa Buho-Buho tidak berjalan optimal.

2. Interpretasi pelaksana dan masyarakat terhadap pedoman pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum optimal disebabkan keterbatasan dana untuk menunjang kegiatan bimbingan teknis bagi pelaksana yang menyebabkan kurang pemahannya pelaksana akan tujuan dan sasaran program ini serta kurang jelasnya pemahaman akan teknis pelaksanaannya, disamping itu minimnya sosialisasi bagi masyarakat akan tujuan dan sasaran program ini menyebabkan kurangnya kontribusi/partisipasi masyarakat dalam kegiatan

3. Aplikasi program Pembangunan infrastruktur menunjuk pada aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada masih belum baik disebabkan para pelaksana tidak memiliki waktu yang cukup dalam pengurusan administrasi pencairan dana, yang biasanya mulai dilakukan pada akhir tahun menunggu penganggaran program tersebut pada perubahan APBDDES sehingga banyak kegiatan yang direncanakan tidak terealisasi

SARAN

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan diatas, maka direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelaksana implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di desa Buho-Buho harus segera mungkin melakukan pembenahan dilingkungan internalnya untuk mendukung ketersediaan tenaga yang kompeten dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang antara lain perbaikan rekrutmen anggota dengan mempertimbangkan kapasitas mereka baik

tingkat pendidikan maupun pengetahuan akan Teknologi Informasi.

2. Pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka dapat memahami tujuan dan sasaran program pembangunan infrastruktur dengan baik sehingga akan memberi dampak semakin meningkatnya kontribusi masyarakat baik dalam bentuk tenaga ataupun dana

3. Perlunya perbaikan mekanisme penganggaran program ini melalui

penganggaran dananya pada APBDES sehingga para pelaksana memiliki waktu dalam penyediaan administrasi untuk merealisasikan rencana-rencana yang kemudian penyerapan anggaran lebih optimal.

4. Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap rapat-rapat desa sehingga masyarakat bisa mengetahui proses perkembangan pembangunan infrastruktur di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Agustino, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Abdul, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press.
- Basri, dan Subri. 2006. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Grafindo
- Dunn, N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Di Terjemahkan) Oleh Samodra*. Wibawah.dkk. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edwards III. (1980), *Implementing Public Policy. United States Of America: Congressional Quarterly Inc*
- Gaffar, 2009. *Politik Indonesia: Trunsisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jones, C. O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company
- Kuncoro, 2010 *Ekonomi Pembangunan. Masalah. Kebijakan, Dan Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roskarya.
- Nanawi, H. 2009. *Publik Policy*. Surabaya : PMN Surabaya.
- Rianto A. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Siagian. 2001. *Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. 2012 *Kebijakan Pubik, Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Persindo
- Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Wresniwiro, 2012 *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Misimedia.
- Yuwono, 2001. *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskondak)*. Semarang: UNDIP

Referensi jurnal :

- Ayu Ningsi Slamet, Martha Ogotan Very. Y. (2017) *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa)*. Jurnal Administrasi Publik 3(046)

Eli Kristia Saragih, Joyce Jacinta Rares, Joorie M. Ruru (2016) *Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Adminiistras Publik 3(41)

Kristina Hohakay, Wilson Rompas, Joyce Jacinta Rares (2015) *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam*

Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara Manado. Jurnal Administrasi Publik 2(30)

Rismawati Maruf, Burhanuddin Kiyai, Rully Mambo (2016) *Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai di Kantor Kecamatan Bunaken Manado*. Jurnal Administrasi Publik 3(400)